



DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PROBOLINGGO

TAHUN
2023

i wanna get home
safely!

LAPORAN KINERJA
INTANSI PEMERINTAH

LKjIP



KATA PENGANTAR

Dalam Tugas pokok dan fungsi utama dari lembaga pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Pelayanan publik yang baik akan mempunyai efek yang sangat luas bagi masyarakat, termasuk peningkatan kepercayaan, pembentukan lembaga pemerintah yang berkualitas dan berwibawa dan tentunya akan menciptakan sinergi sumber daya pembangunan dari berbagai stake holder.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban Dinas Perhubungan Kota Probolinggo sesuai dengan Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan/penyelenggaraan pemerintahan pada sektor Transportasi, sebagaimana yang telah dituangkan dalam Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kota Probolinggo Tahun 2023 ini semoga menjadi sarana evaluasi dan dapat dilaksanakan untuk mengoptimalkan kinerja dinas yang lebih baik lagi dimasa mendatang.

Probolinggo, Januari 2024
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PROBOLINGGO

Dr. AGUS EFENDI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19730909 199201 1 001



DAFTAR ISI

| | |
|---|---------------|
| Kata Pengantar..... | i |
| Daftar Isi | ii |
| Daftar Tabel..... | iii |
| Ikhtisar Eksekutif..... | iv |
| | |
| BAB I. PENDAHULUAN | I-1 |
| 1.1. Gambaran Umum Organisasi | I-1 |
| 1.2. Permasalahan Utama yang Dihadapi oleh Instansi | I-5 |
| | |
| BAB II. PERENCANAAN KINERJA | II-7 |
| 2.1. Rencana Strategis..... | II-7 |
| 2.2. Program dan Kegiatan..... | II-9 |
| | |
| BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA | III-17 |
| 3.1. Capaian Kinerja Organisasi | III-17 |
| 3.2. Realisasi Anggaran | III-31 |
| | |
| BAB IV.PENUTUP | IV-38 |
| 4.1. Kesimpulan | IV-38 |
| 4.2. Langkah-langkah untuk Meningkatkan Kinerja | IV-39 |



DAFTAR TABEL

| | |
|---|--------|
| Tabel 2.1 Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran | II-9 |
| Tabel 2.2 Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023..... | II-10 |
| Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 | II-16 |
| Tabel 3.1. Pencapaian Kinerja dari Tujuan Dinas Perhubungan Tahun 2023 | III-18 |
| Tabel 3.2. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2023 | III-18 |
| Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja | III-19 |
| Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 s.d. Akhir Tahun 2023 | III-20 |
| Tabel 3.5. Alokasi Per- Sasaran Pembangunan | III-20 |
| Tabel 3.6. Pencapaian Kinerja dan Anggaran | III-21 |
| Tabel 3.7. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | III-23 |
| Tabel 3.8. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan | III-24 |
| Tabel 3.9. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja | III-24 |
| Tabel 3.10. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2023 | III-26 |
| Tabel 3.11. Perbandingan Realisasi Kinerja | III-27 |
| Tabel 3.12. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 s.d. Akhir Tahun 2023 | III-27 |
| Tabel 3.13. Alokasi Per- Sasaran Pembangunan | III-28 |
| Tabel 3.14. Pencapaian Kinerja dan Anggaran | III-29 |
| Tabel 3.15. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | III-30 |
| Tabel 3.16. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan | III-30 |
| Tabel 3.17. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja | III-31 |
| Tabel 4.1. Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 | IV-38 |

DAFTAR BAGAN

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Gambar 1.1 STRUKTUR ORGANISASI | I-1 |
|--------------------------------------|-----|



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Secara teoritis, birokrasi Pemerintahan memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi Pelayanan berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat (public service), fungsi Pembangunan yang berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu di sektor pembangunan (development function), dan fungsi Pemerintahan Umum, berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (regulation and function), termasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban. Ketiga fungsi birokrasi pemerintahan tersebut, menunjukkan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah, cakupannya sangat luas yaitu pelayanan yang menghasilkan public good, seperti jalan, jembatan, pasar dan lain-lain, dan pelayanan yang menghasilkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat (fungsi regulasi), seperti perijinan dan lain-lain. Dengan demikian, terhadap 3 (tiga) unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama, adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah, unsur kedua, adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga, adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan pelanggan.

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga Dinas Perhubungan Kota Probolinggo di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunannya dapat berlangsung secara berdaya guna. Hal ini diharapkan berdampak pada penyusunan laporan kinerja yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53



Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Dari 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

1.1.1. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Probolinggo, maka tugas dan fungsi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

A. Tugas Pokok

Dinas Perhubungan Kota Probolinggo mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perhubungan.



B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang Perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perhubungan;
- c. pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang Perhubungan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang perhubungan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

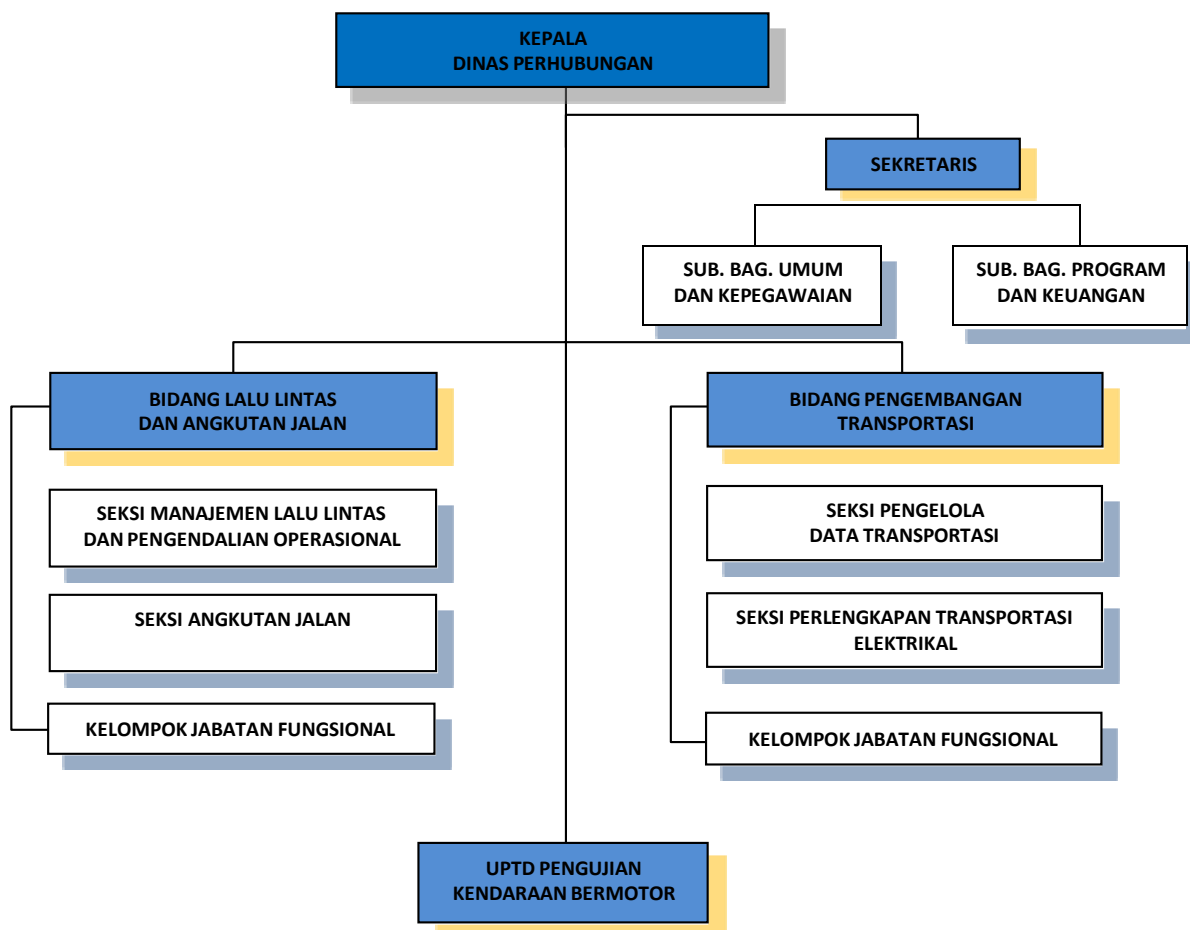
1.1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Probolinggo dipimpin oleh Kepala Dinas, yang membawahi :

1. Sekretariat, terdiri atas Sub Bagian Tata Usaha, Sub Bagian Program dan Keuangan;
2. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terdiri atas Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Pengendalian Operasional, Seksi Angkutan Jalan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bidang Pengembangan Transportasi terdiri atas Seksi Pengelola Data Transportasi, Seksi Perlengkapan Transportasi Elektrikal dan Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor.



Gambar 1.1.
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PROBOLINGGO



1.1.3. PEGAWAI

Pegawai Dinas Perhubungan Kota Probolinggo per Desember 2022 berjumlah 284 (dua ratus delapan puluh empat) orang, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang;
2. Tenaga Kontrak sebanyak 13 (tiga belas) orang;
3. Pegawai Tidak Tetap sebanyak 50 (lima puluh) orang;
4. Tenaga Juru Parkir sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) orang.



1.2. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI OLEH INSTANSI

Dalam masa proses pemulihan dan proses pembangunan infrastruktur jalan pada tahun 2023 secara langsung pada rencana fisik sarana dan prasarana perhubungan sudah mulai kondusif. Sehingga perangkat daerah khususnya Dinas Perhubungan Kota Probolinggo dapat melakukan penganggaran dan perencanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan program dan perencanaan serta aturan dan kebijakan yang telah ditentukan.

Dalam masa Pemulihan yang dihadapi sebelumnya ada beberapa permasalahan yang dihadapi selain setelah masa pandemi adalah :

- a. Pembangunan fisik masih harus menyesuaikan dengan kondisi anggaran yang sudah ditetapkan pada tahun sebelumnya dimana pada saat itu masih dalam pandemi Covid19 sehingga pemerintah daerah berupaya untuk melakukan peningkatan pada perekonomian dan infrastruktur daerah.
- b. Pada saat ini Kemacetan lalu lintas di Kota Probolinggo pada waktu jam sibuk (peak hour) dengan adanya faktor yang mendorong karena kecenderungan pergerakan kendaraan dari daerah pinggiran dan/atau perbatasan Kota Probolinggo menuju ke daerah pusat perkantoran, sentra usaha/pasar/bisnis, sekolah dan sebagainya. Selain itu juga adanya 4 perlintasan sebidang yang sering menimbulkan kemacetan saat-saat jam sibuk serta belum terselesaikannya pembangunan Pasar Baru Probolinggo.
- c. Pencemaran lingkungan (polusi udara) yang diakibatkan oleh sektor industri dan kendaraan bermotor (motorized traffic) seperti angkutan kota, bus, truk, kendaraan pribadi dan sepeda motor, dengan faktor yang mempengaruhi adalah karena banyaknya volume kendaraan yang beroperasi di jalan.
- d. Rendahnya penggunaan kendaraan angkutan umum, dimana faktor yang mempengaruhinya adalah kondisi angkutan umum yang belum memenuhi harapan masyarakat, sehingga banyak pengguna jasa transportasi beralih ke ojek online dan meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi.



-
- e. Belum optimalnya fungsi jaringan jalan kota yang difungsikan sebagai jaringan transportasi dari segi dimensi maupun daya dukung jalan.
 - f. Belum terkonsepnya pelayanan sarana dan prasarana transportasi baik dari ketersediaan dan fungsinya.
 - g. Belum optimalnya sistem operasional dalam pengelolaan dan penataan penyelenggaraan perparkiran, dengan faktor yang mempengaruhi adalah masih kurangnya kapasitas ruang parkir.
 - h. Belum optimalnya kapasitas kompetensi SDM Perhubungan terutama dalam hal peningkatan kualitas dan kuantitas SDM bidang IT Perhubungan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024

2.1.1. Visi

Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, pada Pasal 1 ayat (12) dinyatakan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, maka visi harus menggambarkan wujud akhir yang diinginkan oleh suatu daerah, lembaga atau organisasi pada akhir periode perencanaan. Dengan demikian visi memegang peranan penting dalam menentukan arah yang akan dituju oleh suatu daerah/organisasi pada masa mendatang.

Pelayanan bidang perhubungan/transportasi utamanya angkutan umum yang beroperasi dalam kota membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah terutama dalam hal peremajaan armada angkutan sehingga pelayanan angkutan umum mempunyai peranan yang sangat besar, bagi masyarakat golongan bawah, keberadaan angkutan umum berpengaruh terhadap perkembangan volume lalu lintas. Kualitas pelayanan angkutan umum masih sangat rendah, sehingga angkutan umum menjadi pilihan terakhir ketika masyarakat tidak mempunyai pilihan lain. Rendahnya penggunaan angkutan umum dan tingginya intensitas kendaraan pribadi serta penggunaan sepeda motor menyebabkan perkembangan volume lalu lintas menjadi sangat tinggi dan pada jalan-jalan tertentu mengalami kepadatan lalu lintas yang tinggi pula.

Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Kota Probolinggo dalam kurun waktu 2019 – 2024 mengikuti Visi Walikota Probolinggo :

**“MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT UNTUK KOTA PROBOLINGGO YANG LEBIH
BAIK, BERKEADILAN, SEJAHTERA, TRANSPARAN, AMAN, DAN
BERKELANJUTAN ”**



2.1.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dinas Perhubungan Kota Probolinggo dalam upaya mewujudkan Visi Walikota Probolinggo, menentukan Misi ke 3 dalam RPJMD 2019-2024 yaitu :

" Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan "

2.1.3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atas implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada sasaran RPJMD pada Misi Ke Tiga dan Tujuan Pertama yaitu Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, untuk masa mendatang. Adapun tujuannya Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

" Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Insfrastruktur "

2.1.4. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang sesuai dengan RPJMD Tahun 2019 - 2024 yaitu :
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur kota guna menunjang upaya peningkatan produktifitas ekonomi dan pelayanan dasar. Maka Dinas Perhubungan menentukan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan; dan
2. Meningkatnya Kualitas Sarana Perhubungan Darat dan Laut yang Memenuhi Standar Keselamatan.



Tabel 2.1. Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator |
|----|---|--|--|
| 1. | Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Insfrastruktur | 1. Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan | 1. Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ yang Tersedia di Kota Probolinggo; 2. Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota Probolinggo; |
| | | 2. Meningkatnya Kualitas Sarana Perhubungan Darat dan Laut yang Memenuhi Standar Keselamatan | 3. Persentase Sarana Transportasi Darat yang memenuhi Standar Keselamatan; 4. Persentase Angkutan Laut yang memenuhi Standar Keselamatan. |

2.2 Program dan Kegiatan

Program adalah sebagai penentuan tindakan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, sehingga program merupakan suatu jenis rencana yang disusun lebih konkrit dan didalamnya terkandung sekumpulan kegiatan yang berbeda-beda akan tetapi menuju pada suatu tujuan yang sama. Berdasarkan hal tersebut diatas dan sesuai dengan prioritas pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2023 maka program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2023 telah mengalami perubahan berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019, Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan telah disesuaikan dengan kebutuhan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo terdiri Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :



| No. | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |
|-----|---|---|--|
| 1 | PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAH DAERAH | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
| | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
| | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu |
| | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya |
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTANJALAN (LLAJ) | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota |
| | | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota |
| | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan |
| | | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor |
| | | | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor |
| | | | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor |



| | | | |
|---|--------------------------------------|---|--|
| | | | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor |
| | | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas |
| | | | Uji coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota |
| | | | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota |
| | | | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota |
| | | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin |
| | | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota |
| | | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
| | | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik |
| | | | Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota |
| 3 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/ Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | | |

Berdasarkan rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023 yang mengalami perubahan dan sudah disesuaikan dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 serta kebutuhan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Perubahan pada Dinas Perhubungan Tahun 2023, maka dibutuhkan dana sebesar Rp. 29,505,463,923.00. Dana tersebut terdiri 2 (dua) sumber dana yaitu:

1. Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kota Probolinggo, sebesar Rp. 25.815.453.923.00
2. Dana Insentif Daerah sebesar (DID) Rp. 1.190.010.000.00
3. Dana pajak rokok sebesar Rp. 2.500.000.000.00

Sebagaimana terlampir dalam tabel 2.2 berikut :



PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DINAS PERHUBUNGAN KOTA PROBOLINGGO

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | |
|-----------------|---|--|--------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.15 | URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN | | | | | |
| 2.15.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% | Dinas Perhubungan | 90% | 7.232.664.495,00 | APBD + P-APBD |
| 2.15.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80% | Dinas Perhubungan | 80% | 16.905.700,00 | |
| 2.15.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan | Dinas Perhubungan | 6 Dokumen | 14.105.900,00 | |
| 2.15.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan | Dinas Perhubungan | 4 Dokumen | 2.799.800,00 | |
| 2.15.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan | | 100% | 5.640.135.915,00 | |
| 2.15.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Realisasi Gaji dan Tunjangan ASN yang tepat waktu | Dinas Perhubungan | 528 Orang/Bulan | 5.448.168.615,00 | |
| 2.15.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Persentase dokumen penatausahaan keuangan yang terverifikasi | Dinas Perhubungan | 100% | 187.734.900,00 | |
| 2.15.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan | Dinas Perhubungan | 9 Laporan | 4.232.400,00 | |
| 2.15.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai ketentuan | | 40% | 26.600.000,00 | |
| 2.15.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Persentase Pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai | Dinas Perhubungan | 50% | 26.600.000,00 | |
| 2.15.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan | | 100% | 142.169.370,00 | |
| 2.15.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpenuhi | Dinas Perhubungan | 100% | 27.748.770,00 | |
| 2.15.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Persentase Peralatan Rumah Tangga yang terpenuhi | Dinas Perhubungan | 100% | 9.966.400,00 | |
| 2.15.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Persentase barang cetak dan penggandaan yang terpenuhi | Dinas Perhubungan | 100% | 8.604.200,00 | |
| 2.15.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi | Dinas Perhubungan | 36 Eksemplar | 3.600.000,00 | |
| 2.15.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Persentase kunjungan tamu yang difasilitasi | Dinas Perhubungan | 100% | 9.920.000,00 | |
| 2.15.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terpenuhi | Dinas Perhubungan | 100% | 82.330.000,00 | |



| | | | | | | |
|-----------------|--|--|--------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------|
| 2.15.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Presentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi | | 100% | 10.000.000,00 | |
| 2.15.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya | Jumlah realisasi peralatan dan mesin lainnya | Dinas Perhubungan | 2 Unit | 10.000.000,00 | |
| 2.15.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang terpenuhi | | 100% | 966.201.260,00 | |
| 2.15.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase Jasa Surat Menyurat yang terpenuhi | Dinas Perhubungan | 100% | 2.751.800,00 | |
| 2.15.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang terpenuhi | Dinas Perhubungan | 100% | 225.230.452,00 | |
| 2.15.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi | Dinas Perhubungan | 100% | 17.975.000,00 | |
| 2.15.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi | Dinas Perhubungan | 100% | 720.244.008,00 | |
| 2.15.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD yang terpenuhi | | 100% | 430.652.250,00 | |
| 2.15.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dalam kondisi layak | Dinas Perhubungan | 1 | 32.037.000,00 | |
| 2.15.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam kondisi layak | Dinas Perhubungan | 31 | 368.758.750,00 | |
| 2.15.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase peralatan dan mesin lainnya dalam kondisi baik | Dinas Perhubungan | 17 | 11.009.000,00 | |
| 2.15.01.2.09.07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Persentase Aset Tetap Lainnya dalam kondisi baik | Dinas Perhubungan | 4 | 18.847.500,00 | |
| 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Prosentase Sarana dan Prasarana Perlengkapan jalan sesuai standar Kementerian Perhubungan | | 90% | 22.267.949.628,00 | APBD + P-APBD |
| | | Prosentase Penurunan Angka Pelanggaran Angkutan Jalan | | 11% | | |
| | | Prosentase Ruas Jalan yang terlayani Trayek Angkutan Kota | | 20% | | |
| | | Prosentase Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji Berkala | | 98% | | |
| | | Prosentase Pemenuhan Dokumen Kajian Bidang Perhubungan | | 20% | | |
| 2.15.02.2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan | Dinas Perhubungan | 90% | 18.467.251.128,00 | |
| 2.15.02.2.02.01 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah prasarana jalan yang terbangun | Dinas Perhubungan | 3 | 210.600.000,00 | |
| 2.15.02.2.02.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah pemenuhan alat perlengkapan jalan elektrikal | Dinas Perhubungan | 53 | 2.028.657.000,00 | |
| 2.15.02.2.02.04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Jumlah perlengkapan jalan yang dipelihara | Dinas Perhubungan | 1500 | 16.227.994.128,00 | |
| 2.15.02.2.04 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | Persentase pengawasan pengelolaan parkir di Kota Probolinggo | Dinas Perhubungan | 90% | 696.003.000,00 | |
| 2.15.02.2.04.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah kendaraan yang masuk fasilitas parkir angkutan barang | Dinas Perhubungan | 12 Laporan | 696.003.000,00 | |
| 2.15.02.2.05 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Persentase Kendaraan yang Lulus Uji/laik jalan | UPT Pengujian Kendaraan | 92% | 384.533.400,00 | |



| | | | | | | |
|---------------------|---|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------|--|
| | | | Bermotor | | | |
| 2.15.02.2.05.03 | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Data kendaraan wajib uji | UPT Pengujian Kendaraan Bermotor | 8250 Unit | 51.587.500,00 | |
| 2.15.02.2.05.04 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah bukti lulus uji elektronik yang tersedia | UPT Pengujian Kendaraan Bermotor | 2500 set | 1.500.000,00 | |
| 2.15.02.2.05.07 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah sarana dan prasarana pengujian yang dipelihara | UPT Pengujian Kendaraan Bermotor | 9 Unit | 226.551.500,00 | |
| 2.15.02.2.05.10 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah kendaraan yang lulus uji/laik jalan | UPT Pengujian Kendaraan Bermotor | 8892 Unit | 104.894.400,00 | |
| 2.15.02.2.06 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Jaringan jalan di wilayah kota | Dinas Perhubungan | 77% | 2.667.604.000,00 | |
| 2.15.02.2.06.02 | Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas | Presentase Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen Rekayasa Lalu Lintas | Dinas Perhubungan | 70% | 175.962.000,00 | |
| 2.15.02.2.06.03 | Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Lokasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas | Dinas Perhubungan | 2 Lokasi | 2.500.000,00 | |
| 2.15.02.2.06.04 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah lokasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan LLAJ | Dinas Perhubungan | 83 Lokasi | 2.485.142.000,00 | |
| 2.15.02.2.06.05 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen pembahasan kebijakan LLAJ | Dinas Perhubungan | 8 Kebijakan | 4.000.000,00 | |
| 2.15.02.2.07 | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | Presentase Pelaku Usaha yang taat Andalin | Dinas Perhubungan | 30% | 14.500.000,00 | |
| 2.15.02.2.07.04 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalin | Jumlah Pelaku Usaha yang melaksanakan Andalin sesuai rekomendasi | Dinas Perhubungan | 10 Pelaku Usaha | 14.500.000,00 | |
| 2.15.02.2.09 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Angkutan Penumpang umum di kota probolinggo | Dinas Perhubungan | 13,17% | 3.255.000,00 | |
| 2.15.02.2.09.02 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah angkutan orang dan angkutan barang | Dinas Perhubungan | 5253 Kendaraan | 3.255.000.00 | |
| 2.15.02.2.11 | Penetapan rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Presentase Jaringan Trayek Perkotaan yang ditetapkan | Dinas Perhubungan | 15.69% | 1.000.000.00 | |
| 2.15.02.2.11.02 | Penetapan Kebijakan Dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah peserta sosialisasi Rencana Umum jaringan Trayek Perkotaan | Dinas Perhubungan | 50 Orang | 1.000.000.00 | |
| 2.15.02.2.14 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase penerbitan izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek | Dinas Perhubungan | 204 Dokumen | 33.803.100.00 | |
| 2.15.02.2.14.01 | Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek | Jumlah dokumen perusahaan angkutan jalan yang melakukan pengurusan ijin angkutan orang | Dinas Perhubungan | 12 Laporan | 5.825.000.00 | |



| | | | | | | |
|---------------------|---|--|--------------------------|------------|-----------------------|-------------|
| | Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | dalam trayek | | | | |
| 2.15.02.2.14.02 | Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah ijin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek yang diterbitkan | Dinas Perhubungan | 12 Laporan | 27.978.100.00 | |
| | | | | | | |
| 2.15.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | Prosentase Jumlah Pelanggaran Kapal <7GT | Dinas Perhubungan | 2% | 4.849.800.00 | APBD |
| 2.15.03.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Kapal <7GT yang memenuhi persyaratan laikkelayutan | Dinas Perhubungan | 52 Orang | 4.849.000.00 | |
| 2.15.03.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Nelayan/Pemilik Kapal <7GT yang Mengikuti Pembinaan | Dinas Perhubungan | 60 Orang | 4.849.000.00 | |
| | | | | | | |
| Jumlah Total | | | | | 29.505.463.923 | |



2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja.

Dalam Perjanjian Kinerja ini akan diketahui sasaran (target) yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Oleh karenanya Perjanjian Kinerja ini adalah bentuk pertanggung jawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian target pada sebuah instansi pemerintah (penerima mandat).

Adapun Indikator Kinerja yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kota Probolinggo dapat dilihat dari perjanjian kinerja sebagaimana tersebut di bawah ini :

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target |
|-----|---|---|--------|
| 1. | Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan | 1. Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ yang Tersedia di Kota Probolinggo | 69 |
| | | 2. Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota Probolinggo | 21 |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Sarana Perhubungan Darat dan Laut yang Memenuhi Standar Keselamatan | 3. Persentase Sarana Transportasi Darat yang memenuhi Standar Keselamatan | 99% |
| | | 4. Persentase Angkutan Laut yang memenuhi Standar Keselamatan | 88% |



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Hasil capaian kinerja pada dasarnya merupakan perwujudan dari akuntabilitas instansi pemerintah dalam mengemban visi dan misinya, sebab melalui penetapan hasil capaian kinerja akan dapat diketahui tingkat keberhasilan, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dan kegiatan operasional organisasi.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2023, Dinas Perhubungan Kota Probolinggo menetapkan sasaran sebagai berikut :

Tujuan : "Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur"

Sasaran : 1. Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan; dan
2. Meningkatnya Kualitas Sarana Perhubungan Darat dan Laut yang Memenuhi Standar Keselamatan.

Adapun target dan capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Probolinggo Tahun 2023 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-1 Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan

a. Perbandingan Target dengan Realisasi

Berdasarkan penetapan Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Probolinggo sampai akhir Tahun 2023, maka dihasilkan capaian kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.1. Pencapaian Kinerja dari Tujuan Dinas Perhubungan Tahun 2023**

| No. | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2022 | Capaian Kinerja | TARGET TAHUN 2023 | Capaian Kinerja |
|-----|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | Persentase Infrastruktur Berkualitas Baik | 96% | 97,24% | 98% | 98,09% |

Tabel 3.2. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2023

| Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Persentase |
|---|--------|-----------|------------|
| 1. Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ yang Tersedia di Kota Probolinggo | 69% | 60,93% | 88,30% |
| 2. Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota Probolinggo | 21% | 46,43% | 221,09% |

Analisis Pencapaian Kinerja :

- Pada IKU "**Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ yang tersedia di Kota Probolinggo**" dengan target 69% dan realisasi 60,93% dari Jumlah ruas jalan kota yang terpenuhi sarana dan prasarana LLAJ Tahun 2023 sebanyak 131 ruas jalan dibanding dengan Total ruas jalan seluruh Kota Probolinggo sebanyak 215 ruas jalan dikalikan 100 persen maka capaian persentasenya sebesar 88,30% berdasarkan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\Sigma \text{ Ruas Jalan Kota yg terpenuhi Sarana LLAJ Th.n}}{\Sigma \text{ Seluruh Ruas Jalan Kota}} \times 100 = \frac{131}{215} \times 100 = 60,93\%$$

$$\begin{aligned} \text{Jadi Capaian Persentase} &= \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100 \\ &= 60.93 / 69 \times 100 \\ &\text{sebesar} = 88.30\% \end{aligned}$$



2. Pada IKU “**Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota Probolinggo**” dengan target turun 21% sedangkan realisasi naik 46,43% dari Jumlah Pelanggaran pada Tahun 2023 dari hasil penindakan tilang manual Dinas Perhubungan bersama Jajaran Kepolisian melakukan Operasi Penertiban secara bersama, maka capaian persentasenya sebesar 221,09% berdasarkan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\Sigma \text{Pelanggaran Angk.Jalan Th.n} - \Sigma \text{Pelanggaran Angk.Jalan Th.(n-1)}}{\Sigma \text{Pelanggaran Angk.Jalan Th.(n-1)}} \times 100 = \frac{(41-28)}{28} \times 100 = 46,43\%$$

$$\begin{aligned} \text{Jadi Capaian Persentase} &= \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100 \\ &= 46,43 / 21 \times 100 \\ &\text{sebesar} = 221,09 \% \end{aligned}$$

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja dengan Tahun Lalu

Bila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja tahun lalu (2023) disajikan dengan indikator yang sama dalam tabel berikut :

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja

| Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | |
|---|--------|-----------|----------|
| | | Th. 2022 | Th. 2023 |
| 1. Persentase Sarana LLAJ yang Tersedia di Kota Probolinggo | 69% | 59,53 % | 60,93 % |
| 2. Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota Probolinggo | 21% | 0 % | 46,43% |



c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023 sampai dengan akhir periode Renstra

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Perubahan Renstra 2019 - 2024) adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 s.d. Akhir Tahun 2023

| Indikator Kinerja Utama | Target Akhir Renstra (Th. 2024) | Realisasi Th. 2022 | Realisasi Th. 2023 | Tingkat Kemajuan |
|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 1. Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ yang Tersedia di Kota Probolinggo | 70% | 59,53 % | 60,93 % | 1,4 % |
| 2. Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota Probolinggo | 20% | 0% | 46,43% | 46,43 % |

d. Alokasi per- Sasaran Pembangunan

Untuk mengetahui persentase anggaran pada masing-masing sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan (total) anggaran Dinas Perhubungan sebesar Rp. 29.505.463.923,- dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.5. Alokasi Per- Sasaran Pembangunan

| Indikator Kinerja Utama | Anggaran (Rp.) | Prosentase Anggaran terhadap anggaran Perangkat Daerah |
|---|----------------|--|
| 1. Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ yang Tersedia di Kota Probolinggo | 18,599,893,156 | 63.04 % |
| 2. Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota Probolinggo | 3,206,047,490 | 10.86% |



e. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 3.6. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

| INDIKATOR | KINERJA | | | ANGGARAN | | |
|---|------------|---------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
| Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ yang Tersedia di Kota Probolinggo | 69% | 88,30% | 60,93% | 18.643.213.128 | 18.599.893.156 | 99.77% |
| Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | | | | | | |
| Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten/Kota | 90% | 111,16 | 123,51% | 18.467.251.128 | 18.204.864.640 | 98,58% |
| Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 53 Unit | 79 Unit | 149% | 2.028.657.000 | 1.963.436.374 | 96,78% |
| Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | 1500 Unit | 1268 unit | 84,63% | 16.227.994.128 | 16.033.044.213 | 98,88% |
| Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota | 77% | 99,05% | 128,63% | 175.962.000 | 167.349.931 | 95.10 % |
| <i>Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas</i> | 70% | 99.05% | 128.63% | 175.962.000 | 167.349.931 | 95,10% |
| Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota Probolinggo | 21% | 0% | 0% | 3.225.703.100 | 3.206.047.490 | 99.40% |
| Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | | | | | | |
| Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan | 90% | 132.27 | 146.97 | 696.003.000 | 680.962.750 | 97.83% |



| | | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------|
| Pembangunan Fasilitas Parkir | | | | | | |
| <i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota</i> | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 696.003.000 | 680.962.750 | 97.83% |
| Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota | 77% | 99,05% | 128,63% | 2.489.142.000 | 2.387.539.768 | 95.91 % |
| <i>Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/kota</i> | 83 Lokasi | 83 Lokasi | 100% | 2.485.142.000 | 2.383.544.768 | 95.91% |
| <i>Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota</i> | 8 Kebijakan | 10 Kebijakan | 125% | 4.000.000 | 3.995.000 | 88.00% |
| Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota | 13.17% | 12,80% | 97.17% | 3.255.000 | 3.000.000 | 92.16% |
| <i>Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1(satu) Kabupaten/Kota</i> | 5253 Kendaraan | 2077 Kendaraan | 39.53% | 3.255.000 | 3.000.000 | 92.16% |
| Penetapan rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 15,69% | 14,88% | 94,84% | 1.000.000 | 750.000 | 75% |
| <i>Penetapan Kebijakan Dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek</i> | 50 Orang | 50 Orang | 100% | 1.000.000 | 750.000 | 75% |



| | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <i>Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i> | | | | | | |
| Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 204 Dokumen | 16 Dokumen | 7.84% | 33.803.100 | 33.643.580 | 99.52% |
| Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 5.825.000 | 5.760.400 | 98.89% |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 27.989.100 | 27.883.180 | 99.62% |

f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.7. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| Indikator Kinerja Utama | % Capaian Kinerja | % Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|---|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ yang Tersedia di Kota Probolinggo | 60.93% | 99.77% | -39,16% (Kurang Efisien) |
| 2. Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota Probolinggo | 46,43% | 99,39% | -52,96% (Kurang Efisien) |



g. Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan dan Kegagalan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.8. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

| Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Analisa Penyebab |
|---|--------|-----------|---|
| 1. Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ yang Tersedia di Kota Probolinggo | 69% | 60.93% | Target tidak tercapai dikarenakan ketersediaan pengadaan perlengkapan jalan untuk keselamatan jalan sementara masih terpusat pada Kawasan Tertib Lalu Lintas sekitar Alun-alun dan di wilayah Selatan sekitar Rumah Sakit Baru serta penyesuaian kemampuan sumber daya Pemerintah Kota Probolinggo. |
| 2. Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota Probolinggo | 21% | 46,43% | Kurangnya Kesadaran masyarakat Pengemudi Angkutan jalan dalam berlalu lintas |

h. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

**Tabel 3.9.
Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

| Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |
|---|--------|-----------|--|
| 1. Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ yang Tersedia Di Kota Probolinggo | 69% | 60.93% | <p>Untuk memenuhi Sarana dan Prasarana LLAJ yang Tersedia di Kota Probolinggo, Dinas Perhubungan Kota Probolinggo melaksanakan beberapa Program/Kegiatan/Sub Kegiatan diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Prasarana jalan di jalan Kabupaten/Kota Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota; Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; |
| 2. Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran | 21% | 46,43% | <ol style="list-style-type: none"> Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir |



| | | | |
|------------------------------------|--|--|--|
| Angkutan Jalan di Kota Probolinggo | | | <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota <p>b. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Uji coba dan sosialisasi pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota➤ Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/kota➤ Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota <p>c. Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1(satu) Kabupaten/Kota <p>d. Penetapan rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Penetapan Kebijakan Dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota <p>e. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik➤ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota |
|------------------------------------|--|--|--|

2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Sarana Perhubungan Darat dan Laut yang Memenuhi Standar Keselamatan



a. Perbandingan Target dengan Realisasi

Tabel 3.10. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2023

| Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian |
|---|--------|-----------|---------|
| 3. Persentase Sarana Transportasi Darat yang memenuhi Standar Keselamatan | 99% | 85.27% | 86.13% |
| 4. Persentase Angkutan Laut yang memenuhi Standar Keselamatan | 88% | 100% | 113.64% |

Analisis Pencapaian Kinerja :

1. Pada IKU "**Persentase Sarana Transportasi Darat yang memenuhi Standar Keselamatan**" dengan target 99% dan realisasi 85.27% dari Jumlah Kendaraan yang Lulus Uji Tahun 2023 sebanyak 7.035 Unit dibanding dengan Jumlah Kendaraan yang Wajib Uji sebanyak 8.250 Unit dikalikan 100 persen maka capaian persentasenya sebesar 86,13% berdasarkan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\Sigma \text{ Kendaraan yang Lulus Uji}}{\Sigma \text{ Kendaraan yang Wajib Uji}} \times 100 = \frac{7035}{8250} \times 100 = 85.27\%$$

$$\begin{aligned} \text{Jadi Capaian Persentase} &= \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100 \\ &= 85,27 / 99 \times 100 \\ \text{sebesar} &= 86.13\% \end{aligned}$$

2. Pada IKU "**Persentase Angkutan Laut yang memenuhi Standar Keselamatan**" dengan target turun 87% sedangkan realisasi 100% dari Jumlah Nelayan/pemilik Kapal dibawah 7GT Yang Mengikuti pembinaan keselamatan Angkutan Laut Tahun 2023 sebanyak 30 Nelayan/Pemilik Kapal dibanding dengan Jumlah Undangan Pembinaan tersedia Tahun 2023 sebanyak 30 Undangan Pembinaan dikalikan 100 persen maka capaian persentasenya sebesar 113,64% berdasarkan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\Sigma \text{ nelayan/pemilik kapal} < 7\text{GT yang mengikuti pembinaan}}{\Sigma \text{ undangan Pembinaan Nelayan/pemilik kapal} < 7\text{GT}} \times 100 = \frac{30}{30} \times 100 = 100\%$$

$$\text{Jadi Capaian Persentase} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100$$



$$= 100 / 88 \times 100$$

sebesar= 113,64%

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja dengan Tahun Lalu

Bila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja tahun lalu (2023) disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.11. Perbandingan Realisasi Kinerja

| Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | |
|---|--------|-----------|----------|
| | | Th. 2022 | Th. 2023 |
| 3. Persentase Sarana Transportasi Darat yang memenuhi Standar Keselamatan | 99% | 68.15% | 85.27% |
| 4. Persentase Angkutan Laut yang memenuhi Standar Keselamatan | 88% | 23.23% | 100% |

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023 sampai dengan Target Jangka Menengah Renstra

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Perubahan Renstra 2019 - 2024) adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 s.d. Akhir Tahun 2023

| Indikator Kinerja Utama | Target Akhir Renstra (Th. 2024) | Realisasi Th. 2022 | Realisasi Th. 2023 | Tingkat Kemajuan |
|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 3. Persentase Sarana Transportasi Darat yang memenuhi Standar Keselamatan | 100% | 68.15% | 85.27% | 17.12% |
| 4. Persentase Angkutan Laut yang memenuhi Standar Keselamatan | 89% | 23,23% | 100% | 76.77% |

Pada IKU “**Persentase Sarana Transportasi Darat yang memenuhi Standar Keselamatan**” Pada Tahun 2023 sebesar 85.27% artinya terjadinya



kenaikan dari tahun sebelumnya 2022 sebesar 68.15% dan memiliki Tingkat kemajuan sebanyak 17,12%.

d. Alokasi per- Sasaran Pembangunan

Untuk mengetahui persentase anggaran pada masing-masing sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan (total) anggaran Dinas Perhubungan sebesar Rp. 29.505.463.923,- dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.12. Alokasi Per- Sasaran Pembangunan

| Indikator Kinerja Utama | Anggaran (Rp.) | Prosentase Anggaran terhadap anggaran Perangkat Daerah |
|---|----------------|--|
| 3. Persentase Sarana Transportasi Darat yang memenuhi Standar Keselamatan | 379.631.485 | 1,29% |
| 4. Persentase Angkutan Laut yang memenuhi Standar Keselamatan | 4.750.000 | 0,017% |

e. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 3.13. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

| INDIKATOR | KINERJA | | | ANGGARAN | | |
|---|------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
| PERSENTASE SARANA TRANSPORTASI DARAT YANG MEMENUHI STANDAR KESELAMATAN | 98% | 68,15% | 69,55% | 422.906.700 | 419.582.584 | 99,21% |
| Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | | | | | | |
| Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 90% | 87,64% | 97,38% | 409.913.200 | 408.546.584 | 99,50% |
| Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 4 Unit | 4 Unit | 100% | 190.000.000 | 189.608.559 | 99,79% |
| Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor | 8.000 Unit | 9.747 Unit | 121,84% | 48.134.000 | 48.008.725 | 99,74% |
| Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 0 Set | 0 Set | 0% | 0 | 0 | 0% |



| | | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 9 Unit | 9 Unit | 100% | 71.500.000 | 70.890.500 | 99,15% |
| Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 8.000 Unit | 6.643 Unit | 83,04% | 100.279.200 | 100.038.800 | 99,76 |
| Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota | 80% | 800% | 1000% | 12.933.500 | 11.036.000 | 84,93% |
| Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin | 1 Pelaku Usaha | 8 Pelaku Usaha | 800% | 12.933.500 | 11.036.000 | 84,93% |
| PROSENTASE ANGKUTAN LAUT YANG MEMENUHI STANDAR KESELAMATAN | 2% | 2,02% | 101% | 9.999.800 | 4.842.000 | 48,42% |
| Program Pengelolaan Pelayaran | | | | | | |
| Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kab /Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/ Kota | 70% | 23,23% | 33,19% | 9.999.800 | 4.842.000 | 48,42% |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota | 52 Kapal | 23 Kapal | 44,23% | 9.999.800 | 4.842.000 | 48,42% |

f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.14. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| Indikator Kinerja Utama | % Capaian Kinerja | % Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|---|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 3. Persentase Sarana Transportasi Darat yang memenuhi Standar Keselamatan | 85,27% | 99,21% | -13,08% (Kurang Efisien) |
| 4. Persentase Angkutan Laut yang memenuhi Standar Keselamatan | 100% | 48,42% | 51,58% (Efisien) |



g. Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan dan Kegagalan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.15. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

| Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Analisa Penyebab |
|---|--------|-----------|--|
| 3. Persentase Sarana Transportasi Darat yang memenuhi Standar Keselamatan | 99% | 85,27% | terkait dengan penegakkan regulasi terhadap kendaraan bermotor Over Dimensi dan Overload (ODOL), Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan |
| 4. Persentase Angkutan Laut yang memenuhi Standar Keselamatan | 88% | 100% | Operasi Pengawasan dan Penertiban Transportasi Laut sudah tidak dilakukan lagi dikarenakan daerah tidak memiliki kewenangan lagi sehingga Dishub mengganti kegiatan dengan mengadakan Pembinaan terhadap Nelayan/Pemilik kapal dibawah 7GT yang menghadiri Pembinaan sebanyak 30 orang sesuai dengan undangan Pembinaan sebanyak 30 orang. |

h. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

**Tabel 3.16.
Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Pernyataan Kinerja**

| Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |
|---|--------|-----------|--|
| 3. Persentase Sarana Transportasi Darat yang memenuhi Standar Keselamatan | 99% | 85,27% | 1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kegiatan : a. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Sub Kegiatan : ➤ Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor ➤ Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ➤ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ➤ Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor b. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota ➤ Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin |



| | | | |
|---|-----|------|--|
| 4. Persentase Angkutan Laut yang memenuhi Standar Keselamatan | 88% | 100% | 1. Program Pengelolaan Pelayaran Kegiatan : a. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan : ➤ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota |
|---|-----|------|--|

3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dijabarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.17. Realisasi Anggaran

| NO | PROGRAM | KEGIATAN/SUB | PAGU ANGGARAN | REALISASI | % |
|--|---|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Sasaran : Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan | | | | | |
| Indikator Kinerja : 1. Prosentase Sarana dan Prasarana LLAJ yang Tersedia di Kota Probolinggo | | | | | |
| | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten/Kota | 18.467.251.128 | 18.204.864.640 | 98.58% |
| | Angkutan Jalan (LLAJ) | Pembangunan Prasarana Jalan di jalan Kabupaten/Kota | 210.600.000 | 206.884.053 | 98.23% |
| | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 2.028.657.000 | 1.964.936.374 | 98,97% |
| | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | 16.227.994.128 | 16.033.044.213 | 98,88% |
| | | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota | 175.962.000 | 167.349.931 | 95.10 % |
| | | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | 175.962.000 | 167.349.931 | 95,10% |
| Indikator Kinerja : 2. Prosentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota Probolinggo | | | | | |
| | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | 3.225.703.100 | 3.206.047.490 | 99.40% |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 696.003.000 | 680.962.750 | 97.83% |



| | | | | | |
|--|---|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota | 2.489.142.000 | 2.387.539.768 | 95.91 % |
| | | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/kota | 2.485.142.000 | 2.383.544.768 | 95.91% |
| | | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | 4.000.000 | 3.995.000 | 88% |
| | | Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota | 3.255.000 | 850.000 | 26.11% |
| | | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum | 3.255.000 | 3.000.000 | 92,25% |
| | | untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1(satu) Kabupaten/Kota | | | |
| | | Penetapan rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1.000.000 | 750.000 | 75% |
| | | Penetapan Kebijakan Dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1.000.000 | 750.000 | 75% |
| | | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 33.803.100 | 33.643.580 | 99.52% |
| | | Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | 5.825.000 | 5.760.400 | 98.89% |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | 27.989.100 | 27.883.180 | 99.62% |
| Sasaran : Meningkatnya Kualitas Sarana Perhubungan Darat dan Laut yang Memenuhi Standar Keselamatan | | | | | |
| Indikator Kinerja : 3. Persentase Sarana Transportasi Darat yang memenuhi Standar Keselamatan | | | | | |
| | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 384.533.400 | 377.050.345 | 98.05% |
| | | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor | 51.587.500 | 50.907.000 | 99.74% |
| | | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 0 | 0 | 0% |
| | | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 226.551.500 | 223.025.625 | 99,15% |
| | | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 100.279.200 | 100.038.800 | 98.44% |
| | | | | | |

**Indikator Kinerja :****4. Prosentase Angkutan Laut yang Memenuhi Standar Keselamatan**

| | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Pengelolaan Pelayaran | Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/ Kota | 4.849.800 | 4.156.000 | 85.70% |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota | 4.849.800 | 4.156.000 | 85.70% |
| TOTAL | | 21.114.134.550 | 20.720.630.697 | 98,14% |

Uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah sebesar 7.232.664.495,- dengan realisasi Rp. 7.048.465.386,- (97.45%)

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan jumlah Rp. 16.905.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.885.600,- **(99,88%)** dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp. 18.829.400,- dengan realisasi Rp. 18.819.800,-
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp. 2.799.800,- dengan realisasi Rp. 2.780.000,-
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan jumlah sebesar Rp. 5.640.135.915,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.514.532.887,- **(97,77%)** dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 5.448.168.615,- dengan realisasi Rp. 5.333.810.827,-
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebesar Rp. 187.734.900,- dengan realisasi Rp. 176.503.160,-
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran sebesar Rp. 4.232.400,- dengan realisasi Rp. 4.218.900,-
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan jumlah sebesar Rp. 26.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.289.609,- **(61,24%)** dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi sebesar Rp. 26.600.000,- dengan realisasi Rp. 16.289.609,-
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan jumlah sebesar Rp. 142.169.370,- dengan realisasi Rp. 135.707.914,- **(95,45%)** dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 27.748.770,- dengan realisasi Rp. 24.625.400,-
 - b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sebesar Rp. 9.966.400,- dengan realisasi Rp.



- 9.692.400,-
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp. 8.604.200,- dengan realisasi Rp. 6.580.000,-
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp. 3.600.000,- dengan realisasi Rp. 3.600.000,-
 - e. Fasilitas Kunjungan Tamu sebesar Rp. 9.920.000,- dengan realisasi Rp. 9.795.000,-
 - f. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 82.330.000,- dengan realisasi Rp. 81.414.114,-
5. Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan jumlah sebesar Rp. 10.000.000,- dengan realisasi Rp. 9.600.000,- dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. 10.000.00,- dengan realisasi Rp. 9.600.000
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan jumlah sebesar Rp. 966.201.260,- dengan realisasi Rp. 943.122.726,- **(94,25%)**
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp. 2.751.800,- dengan realisasi Rp. 2.057.000,-
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 225.230.452,- dengan realisasi Rp. 205.209.248,-
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 17.975.000,- dengan realisasi Rp. 17.405.000,-
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 720.244.008,- dengan realisasi Rp. 718.451.478,-
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 430.652.250,- dengan realisasi Rp. 412.326.650,- **(95,74%)** rincian sebagai berikut :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp. 32.037.000,- dengan realisasi Rp. 30.151.399,-
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp. 368.758.750,- dengan realisasi Rp. 353.915.251,-
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. 11.009.000,- dengan realisasi Rp. 10.405.000,-
 - d. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 18.847.500,- dengan realisasi Rp. 17.855.000,-



B. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ) dengan jumlah sebesar 18.643.213.128,- dengan realisasi Rp. 18.372.214.571 (98,55%)

1. Pembangunan Prasarana Jalan di jalan kabupaten/kota sebesar Rp. 210.600.000,- dengan Realisasi Rp. 206.884.053,-
 - DED Pengadaan Pos Jaga Perlindungan Kereta Api
 - SPV Pengadaan Pos Jaga Perlindungan Kereta Api
 - Belanja Modal
2. Penyediaan perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 16.237.032.850,- dengan realisasi Rp. 16.134.502.628,- **(99,37%)** dan rincian sbb:
 - a. Penyediaan perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/kota sebesar Rp. 18.467.251.128,- dengan realisasi Rp. 18.204.864.640 dengan rincian :
 - Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Warning Light
 - Belanja Modal Pengadaan PJU Solar Cell
 - Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).
 - b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan sebesar Rp. 16.227.994.128,- dengan realisasi Rp. 16.033.044.213,-
 - pembelian barang dan jasa,
 - belanja modal (sabuk pengaman),
 - belanja Tagihan Listrik APJ Se Kota Probolinggo (DID)
 - Belanja Gaji Tenaga Teknis Listrik PJU (Non ASN)
 - Belanja Pemeliharaan PJU seKota
 - Belanja Pemeliharaan Kendaraan Operasional (SkyLift)
3. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir sebesar Rp. 696.003.000,- dengan realisasi Rp. 680.962.750,-
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 1.236.692.000,- dengan realisasi Rp. 1.160.298.194,- terdiri dari :
 - Belanja cetak karcis dan stiker parkir berlangganan
 - jasa sharing pendapatan parkir berlangganan
4. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 384.533.400,- dengan realisasi Rp. 377.050.345,- **(99,79%)** rincian sbb:
 - a. Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 51.587.500,- dengan realisasi Rp. 50.907.000,-
 - b. Penyediaan Bukti Lulus Uji pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 0,- dengan realisasi Rp. 0,-
 - c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 226.551.500,- dengan realisasi Rp. 223.025.625,- terdiri dari:



- d. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala kendaraan Bermotor sebesar Rp. 104.894.400,- dengan realisasi Rp. 103.117.720,- terdiri dari :
 - Belanja barang dan Jasa
 - Belanja Pakaian Dinas Lapangan
5. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan jalan Kabupaten/ Kota dengan jumlah sebesar Rp. 2.667.604.000,- dengan realisasi Rp. 2.557.287.199,- **(95,86%)** rincian sbb:
 - a. Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas sebesar Rp. 175.962.604,- dengan realisasi Rp. 167.349.931,- terdiri dari :
 - Belanja Pemeliharaan Cermin Tikungan
 - Belanja Pengadaan Marka Ruas Jalan
 - Belanja Pemeliharaan Rambu
 - Belanja Modal Pengadaan Cermin Tikungan
 - Belanja Pengadaan Rambu
 - Belanja Modal Pengadaan Traffic cone
 - Belanja Modal Pengadaan Water Barrier
 - b. Uji coba dan Sosialisasi pelaksanaan Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 2.500.000 Realisasi Rp. 2.397.500
 - c. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 2.485.142.000,- dengan realisasi Rp. 2.383.544.768,- termasuk Gaji/Honor petugas juru parkir terdiri dari :
 - Gaji Juru Parkir
 - Gaji PTT
 - Belanja ATK dan Mamin
 - d. Forum Lalu Lintas dan Angkutan jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 4.000.000,- dengan realisasi Rp. 3.995.000,-
6. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antara Kota dalam 1 daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 3.255.000,- dengan realisasi Rp. 3.000.000,- **(92,16%)** rincian sbb:
 - a. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota Dalam 1 (satu) Kabupaten Kota sebesar Rp. 3.255.000,- dengan realisasi Rp. 3.000.000,-
7. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah sebesar Rp. 1.000.000,- dengan realisasi Rp. 750.000,- **(75%)** dengan rincian sbb:
 - a. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 3.500.000,- dengan realisasi Rp. 2.800.000,-



8. Penerbitan Izin penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 33.803.100,- dengan realisasi Rp. 33.643.580,- **(99,52%)** rincian sbb:
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik sebesar Rp5.825.000,- dengan realisasi Rp. 5.760.400,-
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 27.978.100,- dengan realisasi Rp. 27.883.180,-
9. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota sebesar Rp. 160.000,- dengan realisasi Rp. 0,- **(0%)** rincian sbb:
 - a. Pengendalian dan pengawasan tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 daerah kabupaten/kota sebesar Rp. 160.000,- dengan realisasi Rp. 0,-

C. Program Pengelolaan Pelayaran dengan jumlah sebesar Rp. 9.999.800,-

1. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha Yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota Dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Di Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 4.849.800,- dengan realisasi Rp. 4.156.000,-
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 4.849.800,- dengan realisasi Rp. 4.156.000,-

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kota Probolinggo terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kota Probolinggo dapat disimpulkan bahwa rata-rata Indikator Kinerja Utama belum mencapai target untuk sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan pada Perubahan Rencana Strategis (Review Renstra)

Berdasarkan uraian capaian kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama atau Indikator Kinerja Sasaran dari Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.1. Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|---|---|--------|-----------|---------|
| 1 | Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan | 1. Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ yang Tersedia di Kota Probolinggo | 69% | 60.93% | 88,30% |
| | | 2. Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota Probolinggo | 21% | 46,43% | 221.09% |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Sarana Perhubungan Darat dan Laut yang Memenuhi Standar Keselamatan | 3. Persentase Sarana Transportasi Darat yang memenuhi Standar Keselamatan | 99% | 85.27% | 86.13% |
| | | 4. Persentase Angkutan Laut yang memenuhi Standar Keselamatan | 88% | 100% | 113.64% |
| | | | | | |

4.2 LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENINGKATKAN KINERJA

Langkah-langkah yang diambil Dinas Perhubungan Kota Probolinggo untuk meningkatkan Kinerja antara lain :

1. Komitmen yang kuat dari Pimpinan dalam Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Penguatan Tim Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Memonitoring setiap Triwulan tentang Pencapaian Kinerja;
4. Melakukan Evaluasi terhadap Program dan Kegiatan;
5. Presentasi Laporan Kinerja tiap Eselon III dan Eselon IV;
6. Melakukan langkah-langkah perbaikan pencapaian kinerja; dan
7. Verifikasi Program dan Kegiatan.



INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PERHUBUNGAN KOTA PROBOLINGGO

TAHUN 2021-2024

Penyesuaian Permendagri 90

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

| | |
|------------------|---|
| INSTANSI | : DINAS PERHUBUNGAN KOTA PROBOLINGGO |
| TUJUAN | : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualiatas Insfrastruktur |
| Indikator Tujuan | : Persentase Infrastruktur Berkualitas Baik |
| TUGAS | : Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Perhubungan |
| FUNGSI | : 1. Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perhubungan. 2. Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Perhubungan; 3. Pelaksanaan Administrasi Dinas Daerah di Bidang Perhubungan; 4. Pelaksanaan Evaluasi Dan Pelaporan Daerah di Bidang Perhubungan; dan 5. Pelaksanaan Fungsi Dinas Lain Yang Diberikan Oleh Walikota Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya |

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan/Formulasi Perhitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab Data |
|-----|--|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan | <p>Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ yang Tersedia di Kota Probolinggo</p> <p><i>Alasan :</i> Ditambah kata "dan Prasarana", karena mencakup seluruh fasilitas perlengkapan jalan baik non Elektrikal maupun Elektrikal</p> | $f(x) = \frac{\Sigma \text{ Ruas Jalan Kota (yg terpenuhi SarPras LLAJ + yg dilayani Angk Kota)}}{\Sigma \text{ Seluruh Ruas Jalan Kota}} \times 100\%$ <p>Dengan : $f(x)$: Prosentase ruas jalan kota Probolinggo yang terpenuhi Sarana dan Prasarana LLAJ</p> <p>Σ Ruas Jalan Kota (yg terpenuhi SarPras LLAJ + yg dilayani Angk Kota) Jumlah Ruas Jalan Kota yang terpenuhi Sarana dan Prasarana LLAJ Tahun berjalan/sekarang</p> <p>Σ Seluruh Ruas Jalan Kota Jumlah Ruas jalan di Kota Probolinggo (SK Walikota terbaru)</p> | Data Fasilitas Perlengkapan LLAJ | Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sie Rekayasa Lalu Lintas dan Sie Pengelolaan Transportasi Elektrikal |
| | | <p>Prosentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota Probolinggo</p> | $f(x) = \frac{\Sigma \text{ pelanggaran AJ Th. n} - \Sigma \text{ pelanggaran AJ Th. (n-1)}}{\Sigma \text{ pelanggaran AJ Th. (n-1)}} \times 100\%$ <p>Dengan : $f(x)$: Prosentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota Probolinggo</p> <p>Σ pelanggaran AJ Th. n Jumlah Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota Probolinggo Tahun berjalan/sekarang</p> <p>Σ pelanggaran AJ Th. (n-1) Jumlah Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota Probolinggo Tahun Kemarin</p> | REKAPITULASI LAPORAN HASIL OPERASI GABUNGAN | Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sie Manajemen Lalu lintas dan Pengendalian Operasional |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Sarana Transportasi Darat dan Laut yang Memenuhi Standar Keselamatan | <p>Persentase Sarana Transportasi Darat yang memenuhi standar keselamatan</p> <p><i>Alasan :</i> Formulasi diganti dengan jumlah Kendaraan Bermotor yang dilayani pada Pelayanan PKB guna terpenuhinya kendaraan laik jalan sesuai dengan standar keselamatan</p> | $f(x) = \frac{\Sigma \text{ Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji Berkala}}{\Sigma \text{ Kendaraan Bermotor yang Wajib Uji}} \times 100\%$ <p>Dengan : $f(x)$: Prosentase Angkutan Jalan yang memenuhi standar keselamatan dan laik jalan</p> <p>Σ Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji Berkala Jumlah Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji Berkala</p> <p>Σ Kendaraan Bermotor yang Wajib Uji Jumlah Kendaraan Bermotor yang Wajib Uji</p> | Data Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor | Unit Pelayanan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor |

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan/Formulasi Perhitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab Data |
|-----|---------|--|---|---|---|
| | | Prosentase Angkutan Laut yang Memenuhi Standar Keselamatan | $f(x) = \frac{\Sigma \text{Kapal} < 7\text{GT yang Memiliki Dok. Kapal (Th. n)}}{\Sigma \text{Kapal} < 7\text{GT yang Tersedia Th. n}} \times 100\%$ <p>Dengan : $f(x)$: Prosentase Angkutan Laut dibawah 7 GT yang Memenuhi Standar Keselamatan</p> <p>$\Sigma \text{Kapal} < 7\text{GT yang Memiliki Dok. Kapal Th. n}$ Jumlah Kapal di Bawah 7GT yang Memiliki Dokumen Kapal Tahun berjalan/sekarang (selesai proses)</p> <p>$\Sigma \text{Kapal} < 7\text{GT yang Tersedia Th. n}$ Jumlah Kapal di Bawah 7GT yang Ada di Kota Probolinggo Tahun berjalan/sekarang</p> | Data Kapal Pengurusan Surat Ukur sip dibawah 7 GT | Bidang Pengembangan Transportasi, Sie Perhubungan Laut |